

STRATEGI POLITIK PARTAI GERINDRA DALAM MEMENANGKAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Hendru Sofian I. Padangi*

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

*Corresponding Author: hendrupadangi@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji strategi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislative (Pileg) tahun 2019, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), strategi politik partai Gerindra akan dikaji dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh (Schroder, 2010) tentang strategi politik. Temuan penelitian menggambarkan strategi yang dimainkan oleh Gerindra dalam memaksimalkan perolehan suara pada pemilu legislative tahun 2019, diantaranya adalah: melakukan konsolidasi, penjarangan bakal calon, perekrutan calon legislative tahun 2019 hingga pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dengan melakukan turun langsung ke lapangan seperti memberikan sumbangan atau sembako untuk masyarakat kurang mampu lainnya dalam hal ini kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok buruh, anak yatim, duda bahkan janda dan lain sebagainya. Selain itu, strategi yang juga dilakukan adalah pemasangan baliho, spanduk, Kampanye, Sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif, baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri.

Kata Kunci: Strategi Politik

ABSTRACT

This article examines the political strategy of the Greater Indonesia Movement Party (Gerindra) in the 2019 General Election (Election) for legislative members (Pileg) especially in West Halmahera Regency. By using a qualitative method (Sugiyono, 2014), the political strategy of the Gerindra party will be studied using the concept proposed by (Schroder, 2010) regarding political strategy. The research findings describe the strategies played by Gerindra in maximizing vote acquisition in the 2019 legislative elections, including: consolidating, screening prospective candidates, recruiting legislative candidates in 2019 to community social activities by going directly to the field such as making donations or donations. basic needs for other underprivileged communities in this case farmers groups, fishermen groups, labor groups, orphans, widowers and even widows and so on. In addition, the strategy that is also carried out is the installation of billboards, banners, campaigns, socialization and political education to sympathizers and the general public continuously with the aim of forming a positive political image, both for parties and for the legislative candidates themselves.

Keywords: Political Strategy

PENDAHULUAN

Partai politik adalah salah satu dari instrumen demokrasi, dimana sebuah partai politik dapat meningkatkan kualitas dari demokrasi yaitu melalui Pemilihan Umum karena keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya yang dapat disalurkan melalui partai politik. Banyak juga kekuatan sosial masyarakat menyalurkan aspirasinya kepada partai politik. Sejarah partai politik di Indonesia juga merupakan bukti dari aktualisasi masyarakat yang dilembagakan, yaitu banyak entitas dalam masyarakat yang menyatukan diri dengan membentuk partai politik. Pada mulanya Partai politik lahir sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran Nasional, kesadaran akan satu bangsa. Kesadaran bahwa manusia hidup secara berkelompok dan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemunculan partai politik salah satunya

merupakan alat pemersatu bangsa karena mengingat banyaknya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dengan adanya partai politik tidak ada lagi diskriminasi antar suku dan saling ego dengan menganggap sukunya yang lebih baik lalu berjuang dengan memilih jalan dengan sendirinya. Kesadaran bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Kesadaran akan adanya kesamaan hak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bidang politik juga menunjang lahirnya sebuah Partai politik.

Pada mulanya Partai politik lahir sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran Nasional, kesadaran akan satu bangsa. Kesadaran bahwa manusia hidup secara berkelompok dan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemunculan partai politik salah satunya merupakan alat pemersatu bangsa karena mengingat banyaknya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dengan adanya partai politik tidak ada lagi diskriminasi antar suku dan saling ego dengan menganggap sukunya yang lebih baik lalu berjuang dengan memilih jalan dengan sendirinya. Kesadaran bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Kesadaran akan adanya kesamaan hak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bidang politik juga menunjang lahirnya sebuah Partai politik.

Di negara-negara penganut demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak untuk turut menentukan wakil-wakilnya, bahkan perlu berpartisipasi "mempengaruhi" perumusan *public policy*. Dengan meluasnya hak pilih bagi rakyat, maka kegiatan politik mulai berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara pendukung menjelang masa pemilihan umum, dengan demikian lahirlah partai politik. Dalam konsepsi seperti ini, maka partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri.

Para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen dan kepala pemilih menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama ditentukan hingga menjelang hari pemungutan suara. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pemilu dalam sistem demokrasi, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada (institusi primordial baik yang bersifat keagamaan maupun kedaerah), mesin-mesin politik yang ada (organisasi sosial ataupun kelompok kepentingan, baik partai politik, organisasi kepemudaan, dan media), proses pencitraan, sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan yang pada dasarnya hal ini adalah instrument dari serangkaian usaha Pemenangan dalam Pemilu. Hal ini lumrah terjadi sejak bergulirnya Orde Reformasi yang membawa peran terhadap demokratisasi di Indonesia, dimana setiap partai politik berkompetisi dalam setiap pemilu, dan setiap partai politik memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan politik dalam pemilu. Periode 1988 sejak reformasi hingga sekarang atau masa transisi demokrasi Indonesia, proses demokratisasi di Indonesia telah mengalami perubahan menuju perbaikan konsep dan pelaksanaannya. Dengan terciptanya pemilu yang transparan tanpa terlalu banyak intervensi atau tekanan, sebagai salah satu parameter kemajuan demokratisasi.

Dalam konteks Indonesia, kemunculan partai-partai (politik) pada awalnya adalah bertujuan "mempercepat" pergerakan nasional menuju cita-cita kemerdekaan, dan dalam banyak aspek menolak untuk terlibat atau bekerjasama dengan kolonial. Perkembangan selanjutnya, baik Orde Lama maupun Orde Baru, demokrasi Indonesia sempat "terkebiri". Fenomena ini berimplikasi pada tuntutan reformasi dan perombakan sistem politik dan demokrasi yang memihak rakyat, maka "lahirlah" beragam partai sebagai suatu instrumen utama bagi demokratisasi. Parpol pada hakikatnya merupakan elemen penggerak sistem politik, sekaligus alat untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, dengan mewakili kepentingan tertentu, memobilisasi masyarakat, dan melakukan kaderisasi demi melahirkan pemimpin. Salah satu dari kemunculan partai itu adalah partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

Partai GERINDRA merupakan partai pendatang baru dalam panggung politik Indonesia, yang baru terbentuk bulan Desember tahun 2007. Tokoh-tokoh pendiri partai antara lain: Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon dan Muchdi PR7. Prabowo Subianto ketika diwawancarai secara eksklusif oleh Dalton Tononaka, yang disiarkan Metro TV 2009, mengemukakan: "Partai Gerindra didirikan dengan dasar pikir, mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan; sistem politik tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dari

kemelaratan; bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar, yang berakibat menggelembungnya jumlah rakyat miskin dan menganggur”.

Dalam tataran politik praktis, guna memenangkan kontestasi politik partai politik diharuskan mempunyai strategi politik yang sebaik mungkin guna menarik massa agar bersedia menentukan pilihannya pada calon legislative yang diusungnya. Sekaligus memenangkan percaturan politik yang diikutinya. Strategi politik dapat dimaknai sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai keinginan maupun cita-cita politik. Strategi politik menjadi hal yang penting tidak hanya bagi partai politik dan pemerintahan, namun juga bagi organisasi non-partai politik. Dalam kajian lain strategi politik diartikan sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi pemilu maupun dalam pemilukada.

Strategi politik digunakan untuk menciptakan kekuasaan yang diinginkan partai Gerindra untuk merebut kekuasaan di dewan parlemen. Strategi politik ini biasa digunakan pada masa kampanye untuk memperoleh suara dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat terpengaruh dengan propaganda yang digunakan Partai Gerindra. Strategi yang digunakan dalam hal ini para caleg mendekati masyarakat secara langsung dan tidak langsung, seperti datang ke rumah, mengikuti kegiatan masyarakat, membagikan sembako, uang dan kaos. Strategi politik yang digunakan partai Gerindra dalam mendekati masyarakat dapat melalui pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional untuk mendapat simpati dari masyarakat. Partai Gerindra juga mengutus calegnya berlomba memperkenalkan diri kepada masyarakat melalui media massa, sudut keramaian, pinggir jalan, dan tempat-tempat strategis untuk merebutkan kursi legislatif.

Salah satu strategi politik yang cukup menarik untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi politik partai Gerindra dalam memenangi pemilu legislatif di basis daerah Kabupaten Halmahera Barat Dengan visi dan misi yang diembannya, partai Gerindra kemudian ikut bertarung dalam pemilu Legislatif 2019. Pertarungan ini menghasilkan suara sebanyak 17.594.839 atau 12.57%. Perolehan suara ini melewati *parliamentary* treshold yang disyaratkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Selain itu, di tingkat lokal, khususnya di kabupaten Halmahera barat, partai Gerindra juga berhasil memperoleh suara sebanyak 6.483 yang dikonversi menjadi 3 kursi anggota legislatif Daerah Kabupaten Halmahera Barat periode 2019-2024. Namun demikian, pada level lokal (Kabupaten Halmahera Barat), perjuangan Partai Gerindra dapat dinilai mengalami penurunan dibandingkan pemilu sebelumnya karena dari pemilu sebelumnya dapat menghasilkan 4 kursi.

Ada yang istimewa dari Pemilihan umum (pemilu) 2019 yang merupakan pesta lima tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia yang sudah digelar, dimana dalam sejarah pesta demokrasi baru pertama kali dilaksana Pemilu Serentak mulai Dari Pemilihan DPR-RI, DPD, DPRD, bahkan sampai pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara bersamaan.

Ritual politik yang keduabelas sudah digelar dalam perspektif sejarah kehidupan politik Negara kita saat ini sudah diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih 575 Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), 136 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi ataupun Kabupaten/Kota, dan pada tanggal yang sama untuk memilih pasangan Calon presiden dan wakil presiden 2019-2024. maka dari pemilu serentak 2019 inilah menjadi tantangan besar bagi pengurus partai Gerindra khususnya di Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya terlebih khusus dalam menentukan strategi yang tepat dalam pemilihan umum legislatif 2019.

LANDASAN TEORI

A. Partai Politik

Partai politik berakar dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran-Pemikiran yang serupa atau sama sehingga pikiran dan orientasi mereka dikonsolidasikan Miriam Budiardjo (2008:403).

Secara etimologis Partai dapat ditelusuri jejaknya dari bahasa latin, yaitu *Partire* yang bermakna “membagi” atau “memilah” atau juga bisa disejajarkan dengan kata Part yang bermakna bagian. Sedangkan menurut istilah, Santori memberi pengertian partai politik sebagai

kelompok politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, dan mampu menempatkan, melalui pemilihan umum, para calon untuk duduk dalam Legislatif dan pemerintahan (Damsar 2012:224).

Dalam bukunya *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, Meriam Budiardjo membuat batasan partai politik sebagai suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Mark N. Hogapain (dalam Muslim Mufti 2012:123), Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dengan demikian, basis sosiologis setiap partai politik adalah adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangan dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Alam Ware dalam bukunya, *Political Parties and Party System*, menyebutkan bahwa partai politik adalah institusi politik yang mencari pengaruh dalam suatu Negara, dengan tujuan mengisi posisi strategis dalam pemerintahan dan beberapa hal, partai politik berusaha mengagregasikan kepentingan dalam masyarakat, sehingga kepentingan masyarakat dapat tersalurkan melalui partai politik (Muslim Mufti 2012:124).

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka Penulis menyimpulkan Partai politik sebagai kelompok yang terorganisasi, ditandai dengan adanya Visi, misi, tujuan, platform, dan program dan agenda dan mengikuti pemilihan umum untuk meraih kekuasaan atau jabatan legislatif dan eksekutif.

B. Strategi Politik

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *strategos*, yang diartikan sebagai tindakan-tindakan yang ditempuh oleh organisasi-organisasi untuk mencapai sasaran dan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dibutuhkan pengambilan keputusan strategis. Menurut Hunger strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuannya (Arbi Sanit, 2010:13).

Jact Trout dalam (Sidarta GM, 2008:9) mendefinisikan strategi sebagai beberapa cara untuk untuk membuat kita menjadi tampak unik dibandingkan yang lain atau pesaing, serta memanfaatkan keunikan itu agar diingat pelanggan dan calon-calon pelanggan, lalu (mereka) memiliki kerelaan untuk menggunakan produk (barang jasa) yang kita produksi. Petuah tersebut dikenal dalam kompetisi bisnis. Namun demikian tidak tak salah bila merujuknya kepersaingan politik. Apalagi menyadari bahwa kompetisi dalam dunia bisnis tak ubahnya "irisasi" atau sebagian dari strategi dalam dunia politik (Sidarta GM, 2008:10). Strategi dalam pengertian sempit maupun luas terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Dengan demikian strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Peter Schoder (2010:26) strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi berbicara teknik pendekatan kontestan pada kelompok pemilih. Oleh karena itu, strategi politik harus dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara instan melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pertarungan politik.

Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politik yang terbantu dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau kontestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan coblos para pemilih. Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa calon legislatif yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Jadi, strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.

Perencanaan Konseptual Strategi Politik menurut Peter Schroder (2010:28) ada 10 langkah strategi politik yaitu:

1. Merumuskan Misi

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan. Misi harus mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realitis.

2. Penilaian Situasional & Evaluasi

Analisis situasi dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi. Caranya adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Fakta

Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan eksternal yang relevan. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para pekerja atau lingkungan di mana akan direalisasikan. Pembatasan antara fakta internal dan eksternal tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.

Fakta kompetitor atau pesaing adalah fakta yang berasal dari organisasi-organisasi, yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita sendiri. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal dari masyarakat yang akan dijalankan.

b. Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Fakta-fakta telah terkumpul, secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi. Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut mendukung atau justru mengganggu pelaksanaan. Apabila sebuah fakta mendukung, fakta ini menjadi kekuatan. Sebaliknya, apabila mengganggu pelaksanaan, ia akan menjadi kelemahan.

c. Analisa Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi. Setelah mengelompokkan berdasarkan kadar kepentingan, perlu untuk menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya mengurangnya. Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan dalam konteks perencanaan strategi politik dan mengamati lingkungan eksternal.

d. Umpan-Balik (Feedback)

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Apabila analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategis yang jelas sehingga kemenangan pasti dapat diperoleh, dan kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai.

3. Perumusan Sub-Strategi

Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju ke depan untuk perumusan sub-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi.

a. Menyusun Tugas-Tugas

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, lahirlah tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tugas-tugas tersebut adalah meneliti kelemahan kita yang harus

dieliminir, memberikan pertahanan dengan cara menutupi, mengalihkan perhatian yang harus dibangun, setelah itu menelaah kekuatan kita untuk menyerang lawan dan jika lawan menunjukkan kelemahan yang tidak berhubungan dengan kekuatan kita, maka kita harus membangun kekuatan ini.

b. Merumuskan Strategi

Pertama-tama harus memilih isu-isu yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan. Isu-isu ini hendaknya berupa isu atau argument yang membawa keuntungan yang jelas. Lingkungan di mana sebuah isu dijalankan memainkan peranan yang penting dalam penentuan isu dan memusatkan kekuatan serta semua penyerangan hanya satu isu dalam waktu tertentu saja.

c. Mengevaluasi Strategi

Masing-masing strategi yang dipilih untuk menyelesaikan tugas haruslah saling melengkapi. Mereka harus saling cocok, baik di tingkat sub-sub strategi maupun dalam strategi menyeluruh. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang dipilih setelah strategi itu dirumuskan.

4. Perumusan Sasaran

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Tujuan sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan.

5. Target *Image* (Citra Yang Diinginkan)

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau *Public Relations* (PR) dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat "PR", setelah keputusan mengenai "citra yang diinginkan" (target *image*) ditetapkan. Target *image* melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target *image* ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan.

6. Kelompok-Kelompok Target

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan (target *image*). Apabila kelompok target telah didefinisikan, fondasi untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci.

7. Pesan Kelompok Target

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diteriam masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu.

8. Instrumen-Instrumen Kunci

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen-instrumen kunci yang akan

digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.

9. Implementasi Strategi

Dalam mengimplementasikan strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrumen kunci. Setelah itu baru lah peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek yaitu pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Hubungan antara ketiga pihak ini, kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi dan etika merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung pada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

10. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri.

C. Kampanye

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Kampanye merupakan media penyampaian pesan politik guna menarik simpati masyarakat, yang dilakukan secara terorganisir pada periode yang telah ditetapkan. Biasanya kampanye politik mengangkat isu-isu yang berkembang serta masalah-masalah yang berkembang saat ini. maka biasanya pesan yang disampaikan oleh komunikator lebih kepada bagaimana pengentasan masalah yang sedang dihadapi. Kualitas sebuah kampanye, ditandai oleh tidak banyaknya janji-janji yang menipu rakyat. Mengingat belum ada mekanisme apapun untuk menagi janji-janji itu pasca pemilu serta adanya penyakit lupa janji setelah di lantik. Yang justru berkualitas adalah jika dalam kampanye, pada calon memaparkan komitmen dan visi mereka dalam menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi (Topo Santoso 2004:176)

Kotler dan Roberto seperti yang dikutip dalam (Cangara Hafied 2009: 299) menjelaskan bahwa kampanye adalah sebuah upaya yang terorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran yang bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku. Sedangkan menurut Cangara kampanye adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memiliki wawasan terhadap perilaku yang menjadi keinginan pemberi informasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 1 ayat 35 pengertian kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menwarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta pemilu.

Merujuk pada definisi-definisi diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam setiap aktivitas kampanye setidaknya mengandung empat hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

D. Komunikasi Politik

Komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Selain itu komunikasi politik juga merupakan suatu proses pengoperasian lambang atau symbol komunikasi yang berisi pesan politik dari seorang atau

kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sifat dan tingkhalaku khalayak yang menjadi target politik (Dan Nimmo,2010:120).

Komunikasi politik adalah sebuah proses pengoperasian lambang-lambang atau symbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingka laku khalayak yang menjadi target politik (Cangara Hafied, 2009:35).

Komunikasi politik merupakan proses penyampaina pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara *inherent* di dalam setiap fungsi sistem politik.Berdasarkan pernyataan tersebut partai politik mempunyai salah satu fungsi sebagai komunikasi politik. Maksudnya adalah fungsi komunikasi politik, partai politik terhadap konstituennya dengan memberikan informasi, masukan, seputar dunia politik kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008:408).

Faktor-faktor dari proses komunikasi politik menurut (Cangara Hafied, 2009:99) meliputi:

1. Komunikator Politik

Komunikator politik adalah Partisipan yang dapat menyampaikan atau memberikan informasi tentang hal-hal yang mengandung makna ataubobot politik.

2. Pesan Politik

Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidakdisadari yang isinya mengandung bobot politik.Yaitu bagaimana agarsetiap pesan politik yang disampaikan dapat dimengerti oleh setiapanggota ataupun masyarakat.

3. Saluran atau Media politik

Saluran atau media Politik adalah alat atau sarana yang dipergunakan oleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan politiknya.Dimana setiap kegiatan ataupun pesan yang ingin disampaikan olehpartai politik di tampilkan disetiap media politik.

4. Sasaran atau Target Politik

Sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepadapartai atau kandidat dalam Pemilihan Legislatif.

E. Pemilihan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemilu adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).Pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik Negara demokrasi modern Lances Castles(dalam Efriza 2012:357).

Pemilu sebagai alat demokrasi yang berarti memposisikan pemilu dalam fungsi asasi sehingga wahana pembentuk resfrentative government. Menurut UUD 1945 dan Amandemen pasal 22E pengertian pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pemilu adalah dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilu adalah di selenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Desa, presiden, wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu partai politik.
4. Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui perseorangan.
5. Pemilu adalah di selenggarakan oleh suatu komisi pemilu untuk bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan beberapa definisi pemilu diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pemilu atau pemilihan umum adalah proses orang untuk dijadikan pengisi jabatan jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintah sampai desa. Pengertian lain pemilu adalah sala satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunkasi massa, lobi dan aktivitas lainnya.

F. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan umum legislative adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk pemilihan Anggota DPRD, DPD, dan DPR RI. Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 ayat 3,4,5 bahwa dewan perwakilan rakyat, selanjutnya disebut DPR, dewan perwakilan daerah disebut DPD, dan DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pemilihan umum legislative adalah memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pemilu merupakan wujud dari penerapan demokrasi oleh seluruh warga Negara Indonesia, proses demokrasi akan berjalan dengan baik apabila seluruh menjunjung aturan main yang sudah diterapkan dalam aturan (Firmanzah, 2010:405).

Dengan demikian, pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu alat yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah, menurut kehendak dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah di amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Jadi, ditengah masyarakat pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan sejarahnya, pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 12 kali, yaitu mulai tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009, 2014, 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Kualitatif (Sugiyono, 2014), yang mengkaji strategi politik partai Gerindra dalam memenangkan calon legislative yang diusungnya pada pemilu 2019, di Kabupaten Halmahera Barat. Strategi Politik akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Schoroder (2010) tentang strategi politik. Menurutnya proses strategi politik terdiri dari proses perencanaannya, implementasi, hingga evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, library research, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, yang dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Strategi Politik Partai Gerindra Dalam Memenangkan Calon Legislatif pada Pemilu Tahun 2019.

Dalam konteks menghadapi kompetisi politik yaitu PEMILU diperlukan persiapan serta strategi dalam menghadapi pertarungan politik. Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan, yakni "Kemenangan". Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandat, dalam perolehan tambahan suara, dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidat atau dalam memperoleh suara mayoritas untuk pemberlakuan suatu peraturan atau kebijakan. Bagaimana kemenangan itu digunakan, itulah tujuan politik yang ada dibalik hasil yang muncul dipermukaan. Strategi politik adalah hal yang mutlak dan harus dimiliki setiap partai politik

dalam upaya untuk memenangkan pemilu. Sama halnya dengan senjata dalam menghadapi sebuah pertarungan, maka strategi juga sangat penting untuk mendukung dan membuka peluang dalam sebuah pertarungan. Hal ini akan dapat mempermudah menghadapi medan apapun. Sebab, dalam pertarungan hanya diperlukan strategi bagaimana menaklukkan lawan dan memenangkan pertarungan.

1. Proses Perencanaan Strategi.

Setelah fase perencanaan konseptual selesai dilakukan, tiba saatnya untuk memasuki fase proses perencanaan strategi berdasarkan temuan dan fakta yang diperoleh peneliti sesuai dengan beberapa langkah dalam perencanaan konseptual menurut *Peter Schorder* sebelumnya.

a. Pemanfaatan Mesin Partai

Strategi dalam memenangkan pemilihan umum legislative tahun 2019 di Kabupaten Halmahera Barat cukup bervariasi, pembahasan ini fokus pada rutinitas partai yang tercermin dalam tiga aktivitas utama yaitu, sosialisasi visi-misi partai, sistem rekrutmen dan sistem kaderisasi.

Pertama para kader kurang maksimal dalam proses pengenalan ideologi, visi, dan misi partai Gerindra pada masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan ada beberapa kader bahkan caleg hanya mencantumkan jargon miliknya sendiri, tanpa memaparkan visi dan misi partai yang seharusnya menjadi bahan jualan untuk caleg itu sendiri, sehingga secara umum para konstituen hanya mengetahui jargon-jargon para caleg. Mayoritas caleg hanya memperjuangkan diri mereka sendiri dan mengesampingkan partai yang menjadi perahu mereka untuk maju di pemilu legislative tahun 2019 Kabupaten Halmahera Barat. Hal tersebut dikuatkan oleh salah satu informan atau pemberi informasi berupa lisan maupun tulisan, akhirnya masyarakat hanya mengenal partai dan figure yang mereka pilih tanpa tahu secara mendalam bagaimana visi dan misi dari partai tersebut.

Kedua, terkait sistem rekrutmen atau penjurangan bakal calon legislative pada pemilu 2019 sangatlah hati-hati, dimana bakal calon atau figure yang mempunyai jati diri yang baik serta memiliki jiwa militan akan sangat berpengaruh pada segmen pemilih. Kemudian yang ditemukan peneliti bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Halmahera Barat apatis terhadap politik, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat pragmatis yang berakibat pada politik uang (*money politic*).

Ketiga, pola kaderisasi yang dilakukan mulai dari tingkat bawah, seperti ranting telah berjalan, tentunya hal ini dapat dilihat bahwa bakal calon legislative pemilu 2019 dikumpulkan dari aspirasi pengurus ranting, terus naik hingga ke dewan pimpinan cabang. Ketua dewan pimpinan cabang masih menjadi penentu utama penempatan kader dalam struktur organisasi partai, bahkan bisa menunjuk langsung orang yang dikehendaki untuk menduduki jabatan tertentu.

b. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan.

Identifikasi kekuatan dan kelemahan merupakan faktor penting dalam melakukan perencanaan strategi. Karena dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki partai atau lawan, maka proses perencanaan strategi akan semakin mudah, efisien dan efektif.

Dari hasil penelitian di lapangan, partai Gerindra Kabupaten Halmahera Barat memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri walaupun partai pesaing lainpun demikian, dengan adanya berbagai jaringan atau sayap partai yang sudah dibentuk sekian lama menjadi dasar atau kekuatan dalam berkompetisi pada pemilu legislative 2019, sebab tanpa adanya mesin-mesin partai atau sayap dan jaringan dari DPC Gerindra Kabupaten Halmahera Barat pada pemilu 2019 itu sendiri, sangatlah mustahil kemenangan akan diraih oleh partai. Mesin-mesin partai, atau jaringan partai adalah bagian dari kekuatan partai dalam pertarungan-pertarungan politik di tingkat nasional maupun lokal. Tetapi jika dilihat kelemahan bahwa partai Gerindra bukan partai besar yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, namun cukup besar memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah selama bertarung secara politik, maka peneliti melihat kendaraan politik bagi caleg yang diusung oleh partai Gerindra akan sangat berpengaruh dan berdampak pada segmen (basis pemilih) di kompetisi pemilihan umum legislative tahun 2019.

c. Peluang dan Ancaman dalam Masyarakat.

Pemilih pragmatis atau pragmatisme pemilih saat ini masih merupakan fenomena umum yang terjadi pada setiap kompetisi. Demikian juga terjadi pada masyarakat Kabupaten Halmahera Barat saat menghadapi pemilu 2019. Untuk mengatasi masalah ini, tim sukses dari caleg dan partai tentunya menyusun beberapa strategi terutama dengan memanfaatkan kos politik yang dimiliki masing-masing caleg.

Beberapa strategi yang direncanakan partai dan caleg serta tim sukses masing-masing caleg diantaranya adalah dengan membuat program pemberian sumbangan baik dalam bentuk dana maupun logistik pada masyarakat (sembako). Dari temuan peneliti oleh salah satu caleg terpilih bahwa untuk pemberian bantuan berupa dana, itu diberikan dengan cara merancang berbagai pertemuan dalam rangka konsolidasi caleg dan tim-tim pemenangan atau tim sukses dan pendukungnya. Dimana setiap caleg akan memberikan dana dengan jumlah yang bervariasi sesuai peluang yang menjadi target dan sasaran. Sementara untuk bantuan berupa logistik akan diberikan secara langsung disaat para caleg, tim sukses serta tim pemenangan melakukan blusukan ke desa-desa, maka tentunya para caleg harus memiliki kos politik yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu atau kampanye agar dapat membantu dalam pengimplementasian strategi, antara lain memberikan berupa sembako kepada masyarakat ditempat mereka berkunjung.

Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa masyarakat atau para pemilih yang sudah tertekan memilih calon anggota legislative (DPRD) dari caleg yang lain akan menjadi ancaman terhadap basis pemilih yang sudah dibulatkan, tekanan memilih caleg yang kemungkinan sama dengan caleg dari pesaing lain akan sulit jika tidak dibarengi kos politik yang cukup, maka yang partai lakukan adalah sesuai situasi dan kondisi sebagai alternatif implementasi strategi.

d. Pemanfaatan Modalitas Calon Legislatif (Caleg).

Dalam fase perencanaan strategi, faktor yang juga penting adalah bagaimana pemanfaat modalitas yang dimiliki oleh seorang kandidat atau caleg. Merujuk pada pendapat Pierre Bourdieu, tentang modalitas, kita dapat mengukur kepiawaian dari caleg beserta tim suksesnya dalam membuat perencanaan strategi yang akan dijalankan dan apakah perencanaan strategi itu dijalankan secara maksimal dalam pemanfaatan modalitas yang dimiliki caleg pada pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Halmahera Barat.

Tentunya DPC Gerindra Kabupaten Halmahera Barat terdapat beberapa indikator modalitas yang sangat signifikan pengaruhnya bagi kemenangan caleg antara lain; Modalitas Ekonomi, Modalitas Politik, dan Modalitas Sosial:

1. Modalitas Ekonomi

Dana merupakan elemen penting sebagai sarana penunjang dalam merealisasikan atau pengimplementasian strategi yang telah ditetapkan. Kepemilikan modal ekonomi menjadi suatu hal yang amat vital. Modal ekonomi, jika merujuk pada pendapat Bourdieu, adalah sumber daya material dalam bentuk property, uang dan lainnya.

Dari sisi ini, peneliti melihat ada dua caleg terpilih sepertinya cukup sebagai dasar modalitas ekonomi. Kepemilikan dibidang usaha walaupun usaha kecil menjadikan caleg ini dapat dikatakan cukup mapan dari sisi ekonomi, selain itu keluarga mereka cukup dikenal pengusaha kecil yang juga cukup berhasil didunia pengusaha atau perdagangan didaerah yang mereka tempati, kemudian memiliki jaringan bisnis yang cukup luas, jaringan-jaringan ini juga akan menjadikan asumsi yang dapat berfungsi sebagai aspek pendukung pendanaan pada pemilu legislative tahun 2019 Kabupaten Halmahera Barat.

2. Modalitas Politik

Modal politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuatan-kekuatan yang memiliki pengaruh secara politis untuk mempengaruhi peluang keberhasilan seorang kandidat atau caleg dalam pemilu, misalnya pekerjaan atau jabatan politis serta berbagai profesi lainnya yang memiliki unsur secara politis. Secara sederhana dapat disimpulkan modal politik adalah bagaimana jabatan-jabatan politik yang dapat dimanfaatkan dalam memobilisasi dukungan dari masyarakat pemilih.

Dari sisi modalitas politik, ketiga caleg terpilih dari tiga dapil yang berbeda tentunya semua memiliki modalitas politik yang cukup mendapatkan kemudahan dalam memobilisasi masyarakat dan dukungan dari para elemen masyarakat, ini merupakan sebuah investasi politik yang cukup strategis sebagai indikator pendukung dalam memobilisasi dukungan atau segmen (basis pemilih) namun temuan dilapangan pada salah satu caleg dari dapil tiga yaitu Bapak Asdian Taluke, SH. MH lebih cenderung pada strategi ofensif dari Peter Schroder, yakni strategi menembus pasar dan memperluas pasar. Hal itu terlihat berdasarkan perolehan suara sebanyak 1.09 suara, angka yang menunjukkan jauh lebih banyak perolehan suara dari semua caleg yang diusung partai Gerindra Kabupaten Halmahera Barat. padahal yang bersangkutan baru pertama kali mengikuti pemilu legislative tahun 2019, dengan demikian yang bersangkutan berhasil menakhodai partai Gerindra dengan jumlah suara terbanyak dari semua caleg sesama partai.

3. Modalitas Sosial

Dari sisi modalitas sosial, terdapat beberapa faktor yang sangat menunjang keberhasilan dari ketiga caleg terpilih di Dapil I, II, dan III. Salah satu indikator modalitas sosial yang dapat disimpulkan sebagai penunjang kemenangan kandidat atau caleg ini adalah terdapat dua caleg pada Dapil I dan II adalah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan di jemaat di Dapil (Daerah Pemilihan) masing-masing, dan juga sebagai incumbent pada periode sebelumnya. Status ini membuat para caleg tersebut cukup terdongkrak dalam memobilisasi masa (masyarakat). Disamping itu banyak melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat istiadat dalam setiap perencanaan strategi sehingga dapat menciptakan citra politik yang positif bagi caleg dan partai di mata masyarakat.

2. Implementasi Strategi.

Keberhasilan implementasi strategi tergantung pada orang-orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini. Di sini, faktor manusia dan operasional memegang peranan penting. Dari perencanaan strategi sebelumnya, peneliti menemukan ada beberapa implementasi strategi yang dipakai partai Gerindra Kabupaten Halmahera Barat pada pemilu legislative tahun 2019 antara lain:

1. Konsolidasi Pengurus Partai.

Pengurus partai merupakan salah satu motor penggerak implementasi strategi pada pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Halmahera Barat, pimpinan partai dalam hal ini Ketua DPC Gerindra bertanggungjawab atas program, pemilihan kandidat atau caleg, pembuatan rencana anggaran dan menyetujui kebijakan untuk implementasi strategi dari masing-masing pengurus partai antara lain pemanfaatan hasil survei dari tingkat bawah (ranting) hingga pengurus cabang. Implementasi strategi dengan memanfaatkan konsolidasi pengurus partai sangat efektif dan efisien yang partai Gerindra terapkan pada pemilu legislative 2019 di Kabupaten Halmahera Barat, tentunya berkaitan langsung dengan penyaringan serta penjarangan aspirasi masing-masing pengurus partai tentang bakal calon legislative yang di usung partai Gerindra pada pemilu legislative tahun 2019.

2. Melibatkan Jaringan Partai.

Aktivitas jaringan partai bekerja untuk mempermudah langkah-langkah strategis yang direncanakan partai atau mesin-mesin partai, pada strategi ini partai Gerindra Kabupaten Halmahera Barat melibatkan jaringan partai yang dibentuk sudah sekian lama antara lain, melibatkan kelompok cendekiawan dari kalangan muslim, kelompok perempuan hingga pemuda.

Pertama, kelompok cendekiawan ini bekerja sesuai ide dan gagasan-gagasan mereka serta persoalan-persoalan yang terjadi pada agama islam, dimana partai Gerindra sesuai identifikasi kekuatan lawan bahwa basis pemilih didaerah pemilihan masing-masing cukup besar didominasi oleh kalangan muslim dalam hal politik praktis, sehingga melibatkan kelompok ini sebagai instrumen politik dari sebuah partai.

Kedua, kelompok perempuan bekerja sebagai salah satu penerak atau memotivasi perempuan dalam hal berpartisipasi politik baik tidak hanya sebagai peserta pemilu pada pemilu saja melainkan mampu memposisikan diri dalam hal pengambilan keputusan.

Ketiga, tentunya kita tahu bersama bahwa pemuda adalah tulang punggung Negara, di mana partai sebagai tempat atau wadah pendidikan politik bagi masyarakat, maka perlu dan harus kita dorong kedepan sebab ini adalah fondasi dalam sebuah sistem, Gerindra melihat bahwa melibatkan pemuda adalah bagian dari politik milenial yang melibatkan generasi di era digitalisasi pada pemilu legislative 2019 di Kabupaten Halmahera Barat.

3. Blusukan.

Blusukan atau dikenal sebagai kegiatan inspeksi langsung secara tersembunyi atau terbuka atau lebih sederhannya lagi dikenal bertatap muka langsung (*face to face*) tanpa sepengetahuan banyak orang yang bertujuan untuk memonitor reaksi dan respond dari masyarakat atau segmen (basis pemilu) melihat situasi dan kondisi dilapangan serta melakukan komunikasi pada warga masyarakat atau simpatisan yang sudah menjadi target dan sasaran partai dan caleg pada saat itu serta menanggapi keluhan mereka. Maka dengan strategi ini partai atau para caleg yang diusung Gerindra bisa memperkenalkan diri secara langsung sebagai calon legislative pada pemilu 2019 serta mampu menciptakan rangsangan positif terhadap pasar.

4. Menjual Ide dan Gagasan (Caleg).

Fokus partai dan caleg Gerindra tentunya pada segmen (basis pemilu). Karena sangat berdampak besar terhadap pemahaman caleg pada kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pemilu di daerah pemilihan masing-masing. Tiga poin penting strategi politik yang efektif yang digunakan partai antara lain:

a. Tawaran program kerja sesuai tupoksi DPRD

b. Menjual ide dan gagasan ke masyarakat.

c. Harus memiliki isi tas (kos politik)

Dari ketiga point di atas di uraikan bahwa, pertama para caleg harus tahu dan mampu menawarkan program kerja sesuai tugas pokok dan fungsi DPRD yang tepat sasaran, Kemudian, mampu menjual ide dan gagasan sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk merebut dukungan pemilu. Kemudian harus memiliki kos politik yang cukup mampu membawa pada pertarungan yang sedang berlangsung, sebab ongkos politik yang begitu mahal yang kemungkinan besar bisa berdampak pada mental caleg yang pesimis akan biaya politik pada pemilihan legislative saat itu.

5. Kos Politik (*Coast Politic*)

Kos politik yang digunakan partai dan caleg Gerindra pada pemilu legislative 2019 di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai langkah alternative yang harus di implemetasikan, mahalnya biaya politik serta keras persaingan antar partai maupun caleg menjadi salah satu acuan atau tolak ukur guna meraih jumlah suara yang signifikan. Tidak ada pilihan lain bagi partai dan caleg sebab realita yang terjadi dilapangan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Halmahera Barat juga apatis terhadap politik yang mengakibatkan pada pragmatisme pemilu.

3. Mengevaluasi Strategi.

Dari amatan dan fakta yang peneliti temukan dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa banyaknya strategi yang digunakan oleh partai ketika mengikuti pemilihan umum legislative tahun 2019, membawa pengaruh baik terhadap perolehan suara partai sehingga cukup banyak calon legislative dari partai Gerindra terpilih menjadi Anggota DPRD periode 2019-2024 Kabupaten Halmahera Barat walaupun sedikit berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Kemudian tentang strategi politik yang akan digunakan partai Gerindra pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 yang akan datang, dari hasil dilapangan ditemukan bahwa strategi yang akan digunakan partai Gerindra kedepan tetap sama akan tetapi mengikuti perkembangan jika ada perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan politik nasional.

B. Strategi dominan yang digunakan.

Pada pengimplementasian strategi sebelumnya ada beberapa strategi saja yang paling dominan yang digunakan partai Gerindra pada pemilihan legislative tahun 2019 di Kabupaten Halmahera Barat antara lain:

1. Blusukan.

Blusukan adalah salah satu strategi yang paling efektif dan efisien bagi partai maupun caleg dalam melakukan pendekatan secara emosional dan rasional kepada segmen (basis pemilih), serta melihat situasi dan kondisi langsung dilapangan untuk mengetahui reaksi serta respond dari masyarakat sesuai keluhan mereka, guna memobilisasi para pendukung untuk memilih caleg tersebut pada pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Halmahera Barat.

2. Menjual Ide dan Gagasan (Caleg).

Caleg partai Gerindra tentunya memfokuskan perhatian pada segmen (basis pemilih). Karena strategi ini sangat berdampak besar terhadap pemahaman caleg pada kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di daerah pemilihan masing-masing, kemudian ide dan gagasan caleg yang ditawarkan sesuai tugas pokok dan fungsi DPRD ketika terpilih sebagai anggota legislative pada pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Halmahera Barat.

3. Kos Politik (*cost politic*).

Mahalnya biaya politik pada pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Halmahera Barat akan berdampak pada *cost politic* yang disiapkan masing-masing caleg, hal ini tentunya sebagai langkah alternative yang harus di implementasikan, sebab mahalnya biaya politik serta keras persaingan antar partai maupun caleg di internal partai menjadi salah satu tantangan dan hambatan dalam meraih jumlah suara yang signifikan. Tidak ada pilihan lain bagi caleg sebab realita yang terjadi dilapangan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Halmahera Barat juga cenderung pragmatis terhadap politik praktis. Sehingga kemenangan caleg terpilih yang di usung Gerindra juga berhasil mendominasi jumlah perolehan suara yang signifikan dari caleg partai yang lain.

KESIMPULAN

Strategi Partai Gerakan Indonesia Raya dalam memenangkan pemilu legislative tahun 2019, Strategi yang digunakan mulai melakukan konsolidasi, penjangkaran bakal calon, perekrutan calon legislative tahun 2019 hingga pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dengan melakukan turun langsung ke lapangan seperti memberikan sumbangan atau sembako untuk masyarakat kurang mampu lainnya dalam hal ini kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok buruh, anak yatim, bapak duda bahkan ibu-ibu janda dan lain sebagainya. Pemasangan baliho, spanduk, Kampanye, Sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif, baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit (2010). *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dan Nimmo (2010). *Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah, 2010. *Marketing Politik*. Jakarta: Obor.
- Miriam Budiarto (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muslim Mufti. 2012. *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka setia.

Peter, Schroder (2010), *Strategi Politik*, Terj. Avianti Agoesman, Indonesia; (Friedrich-Nauman-Stifung fur die Freiheit).

Sidarta. 2008. *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung*. Ciputat: Kalam Pustaka.

Sugiyono (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 21. Bandung: Alfabeta.

Topo Santoso. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber lain:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu